

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Koran Tempo

Wilayah: Kabupaten Kudus

Halaman 1 dan 7

Tamzil Terjerat Jual Beli Jabatan

Ir H Muhammad Tamzil, MT

Tpt/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 18 Agustus 1961
Usia : 57 tahun
Jabatan : Bupati Kudus (2018-2023)

Perjalanan Karier

- Kadinas PU Kab Kudus (1991)
- Wakil Bupati Semarang (2000-2003)
- Bupati Kudus (2003-2008)
- Staf Ahli Gubernur Jateng (2009)
- Pejabat Fungsional Balitbang Jateng (2013-2018)
- Bupati Kudus (2018-2023)

Perjalanan Kasus

Februari 2014
Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis 22 bulan penjara serta denda Rp 100 juta subsidi tiga bulan penjara atas kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004 senilai Rp 21,4 miliar.

Desember 2015
Mendapat bebas bersyarat dari LP Kedungpane Semarang.

Desember 2015
Bersama delapan orang pejabat Pemkab Kudus diamankan oleh KPK dalam OTT terkait dugaan praktik jual beli jabatan di Pemkab Kudus.

KPK Amankan Uang Rp 200 Juta Sembilan Orang Diperiksa

KUDUS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang senilai Rp 200 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pemkab Kudus, Jumat (26/7).

Uang tersebut diduga merupakan hasil praktik jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Kudus HM Tamzil. Berdasarkan informasi dan pengamatan langsung wartawan *Suara Merdeka*, hasil dari OTT tersebut KPK menyegel rumah dinas dan kantor Bupati Kudus, ruang kerja Sekda, ruang staf khusus Bupati, ruang Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, serta sejumlah ruangan di rumah dinas Sekda yang saat ini ditempati staf khusus Bupati.

Selain HM Tamzil, KPK mengamankan delapan orang lainnya diantaranya seorang ajudan, Plt Kadinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kasnudi, dan pelaksana tugas Kadisdikcapil, Eko Hari Djatmiko.

Berdasarkan pantauan, Tim KPK tiba sekitar pukul 10.00. Mereka menggunakan dua mobil minibus. Penyegelan dimulai pukul 12.45, diawali ruangan Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Catur Widiyatmoko, ruangan staf khusus Bupati Agus Suronto, dilanjutkan ruangan Sekda Sam'ani Intakorisi serta berlanjut ke rumah dinas dan kantor Bupati Kudus HM Tamzil, serta rumah dinas Sekda yang saat ini ditempati staf khusus Bupati Agus Suronto.

Tamzil...
(Sambungan hlm 1)

Saat Tim KPK datang, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Catur Widiyatno dan Sekda Sam'ani Intakorisi tidak berada di lokasi. Catur dan Sam'ani sedang ada kegiatan di luar kota.

Tamzil sedianya akan memimpin pisah sambut Kajari Kudus, Herlina Setyorini sekitar pukul 13.00. Herlina akan ditugaskan sebagai asisten perdana dan tata usaha negara di Kajati Banten. Kajari Kudus yang baru, Rustiningsih.

Pisah sambut tetap dilakukan meskipun tidak dapat menyembunyikan wajah-wajah pejabat Kudus yang terlihat sangat gelisah. Pisah sambut pun digelar dipimpin Wakil Bupati HM Hartopo. Usai pisah sambut, Hartopo mengaku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Saya tidak tahu," ucapnya.

Pihaknya menggelar bantuan sosial dan pantauan kinerja sejumlah dinas pada Jumat (26/7) pagi, dilanjutkan shalat Jumat. Dia mengaku belum mengetahui keberadaan bupati hingga sore kemarin. "Saya belum mengetahui keberadaan bupati," jelasnya.

Terkait penyebab penyegelan diduga terkait jual beli jabatan, Hartopo kembali menyebut tidak mengetahui. Disinggung keberadaan pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Catur Widiyatno dan Sekda Sam'ani Intakorisi, mereka berada di luar kota. "Pak Sekda izin ada acara keluarga ke luar kota," ungkapnya.

Sejumlah pejabat Pemkab Kudus lain saat dimintai keterangan juga mengaku tidak tahu menahu mengenai penyegelan KPK. Kadinas Kominfo, Kholif Seif, menyatakan sama sekali tidak mengetahui kejadian tersebut. Pengakuan serupa disampaikan Asisten I Setda Kudus, Agus Budi Satrio.

Pemberian Lain
Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya membenarkan adanya OTT di Pemkab Kudus. Setelah sempat dimintai keterangan awal di Mapolda Jateng, pihak-pihak yang diamankan akan dibawa ke Jakarta, Sabtu (27/7). "Jadi setelah pemeriksaan intensif hari ini, rencana akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta besok pagi," kata Febri, Jumat (26/7).

Namun, Febri belum memastikan apakah kesembilan orang itu dibawa semua ke Jakarta atau tidak. Menurutnya, hal itu tergantung pemeriksaan yang dilakukan hari ini di Mapolda Jateng. Kesembilan orang yang diamankan dijelaskan Febri terdiri dari berbagai unsur mulai staf hingga ajudan Bupati serta pejabat di Pemkab Kudus. Mereka yang ditangkap itu diduga terlibat dalam transaksi terkait jual-beli jabatan untuk pengisian jabatan setingkat eselon II atau kepala dinas.

Terkait uang senilai Rp 200 juta yang disita, pihaknya menduga ada pemberian lain kepada HM Tamzil sebelum dilakukan OTT. "Kami menduga bukan hanya pemberian yang terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang terjadi saat ini. Tapi sebelumnya juga sudah ada beberapa pemberian," ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dugaan itu berdasarkan temuan pihaknya terkait adanya beberapa jabatan yang kosong di lingkungan Pemkab Kudus. Meski demikian, Febri belum menjelaskan secara detail terkait ada dugaan pemberian selain yang diamankan saat OTT.

"Karena ada beberapa jabatan-jabatan kosong juga dan informasi-informasi untuk pengisian jabatan itu tentu perlu kami dalam lebih lanjut, nantinya baik dalam proses pemeriksaan hari ini ataupun dalam proses yang berikutnya," ucapnya.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menambahkan, OTT dilakukan berdasarkan informasi yang diterima KPK dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi. "Setelah dilakukan pengecekan dilapangan atas bukti-bukti awal, KPK segera melakukan tindakan cepat," terangnya.

Menanggapi OTT yang dilakukan KPK di Kudus, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan jika saat ini masih ada pejabat yang tak menjalankan pemerintahan yang bersih maka disebutnya nekat. Lantaran semua mata mengawasi. Tak hanya KPK namun juga masyarakat. Dirinya menilai OTT yang dilakukan KPK sangat penting. Apalagi jika pejabat tersebut sudah tidak bisa dinasihati.

"Kalau sudah tidak bisa dinasihati maka OTT menjadi penting," kata Ganjar. Dikatakannya, di era terbuka saat ini sedang reformasi menuju pemerintahan bersih. Maka menurutnya jika ada yang berani menyalahinya maka itu nekat. "Di era yang sudah terbuka dan di era semua melakukan reformasi menuju pemerintahan bersih maka hanya orang yang beryali tinggi alias nekat yang melakukan itu," ucapnya. (H8,H81,K32-64)